



# Implementasi Pembelajaran Kewarganegaraan Sebagai Upaya Menanggulangi Kasus Toleransi dan Diskriminasi di Sekolah

Ahmad Geo Adenta, Elvan Denny Ichwansyah, Rahmalia Anggraini\*

Universitas Muhammadiyah Pringsewu

**Abstrak:** Pendidikan toleransi bertujuan menangkal radikalisme, sekolah menerapkan pendidikan toleransi untuk menumbuhkan toleransi beragama dilingkungan informal. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dasar dari penelitian ini teori induktif menekankan observasi dan mengembangkan dasar praktik hubungan "intuitif" antar variabel melalui analisis literatur dan metode penelitian kualitatif yang menggunakan sejumlah prosedur sistematis. Kasus intoleransi di sekolah mencakup perundungan berbasis etnis, agama, dan status sosial. Fenomena ini menghambat perkembangan sosial dan emosional siswa serta menciptakan lingkungan belajar yang tidak sehat. Implementasi pendidikan kewarganegaraan dalam mencegah intoleransi dan diskriminasi disekolah mencegah kasus ini. Sehingga pendidikan di sekolah dapat mendorong hidup berdampingan secara berkelanjutan dan kewarganegaraan yang bertanggung jawab.

**Kata Kunci:** Pembelajaran Kewarganegaraan, Toleransi, Sekolah

DOI:

<https://doi.org/10.47134/pgsd.v1i3.645>

\*Correspondence: Rahmalia Anggraini

Email: [rahmaliaanggraini885@gmail.com](mailto:rahmaliaanggraini885@gmail.com)

Received: 07-06-2024

Accepted: 14-06-2024

Published: 21-06-2024



**Copyright:** © 2024 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

**Abstract:** Tolerance education aims to ward off radicalism, schools implement tolerance education to foster religious tolerance in informal environments. This research uses qualitative methods, the basis of this research is inductive theory emphasizing observation and developing a practical basis for "intuitive" relationships between variables through literature analysis and qualitative research methods that use a number of systematic procedures. Cases of intolerance in schools include bullying based on ethnicity, religion and social status. This phenomenon hinders students' social and emotional development and creates an unhealthy learning environment. Implementation of citizenship education in preventing intolerance and discrimination in schools prevents this case. So that education in schools can encourage sustainable coexistence and responsible citizenship.

**Keywords:** Citizenship Learning, Tolerance, School

## Pendahuluan

Indonesia mengalami peningkatan kekerasan terkait agama, dengan 158 kasus pelanggaran hak beragama pada tahun 2014, yang sebagian besar disebabkan oleh aktor negara dan non-negara. Sebuah studi yang dilakukan oleh Institute of Peace and Islamic Studies menemukan bahwa hampir 50% pelajar di kota-kota besar setuju untuk melakukan kekerasan karena agama. Artikel ini mengeksplorasi peran kurikulum tersembunyi dalam pendidikan toleransi (Raihani, 2014).

Pendidikan toleransi di Indonesia bertujuan untuk menangkal radikalisme agama di kalangan pelajar. Namun, hal ini disosialisasikan dalam kurikulum tersembunyi, dipengaruhi oleh visi negara terhadap pendidikan dan pengalaman siswa sehari-hari. Sebagian besar pelajar memandang toleransi sebagai penerimaan hak dan kebebasan beragama, namun rentan terhadap kekerasan simbolik. Pendidikan multikultural harus fokus pada saling ketergantungan antar komunitas agama, mengakui setiap individu sebagai agen dalam komunitas. Pendekatan ini dapat membentuk kembali struktur formal dan menghasilkan pendekatan yang lebih inklusif terhadap pendidikan toleransi, sehingga mendorong masyarakat yang lebih inklusif (Sunhaji et al., 2023).

Intoleransi beragama di sekolah sebagian besar disebabkan oleh lemahnya penekanan negara terhadap pendidikan toleransi, yang dipengaruhi oleh Islamisasi negara dan lembaga pendidikannya. Fokus pada pendidikan toleransi ini tidak kondusif untuk menumbuhkan toleransi beragama di lingkungan informal, seperti lingkungan budaya sekolah dan komunitas siswa. Aparat pedagogi juga berperan dalam mengatur intoleransi, dan posisi manajerial dan pengajar mempengaruhi norma dan nilai sosial. Praktik intoleransi terkait dengan kurikulum tersembunyi yang mendukung toleransi beragama melalui kebijakan sekolah dan perilaku manajerial. Artikel ini bertujuan untuk menjelaskan fenomena pendidikan toleransi dan cakupannya dalam kurikulum tersembunyi ("Tolerance Education in the Hidden Curriculum: A Case Study on Indonesian Public School," 2018).

Pada tahun 2017, Indonesia mengalami lonjakan intoleransi agama-budaya, yang berujung pada meningkatnya sentimen anti-agama dan narasi emosional. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melaporkan bahwa siswa sering menolak ketua OSIS yang berbeda agama, dan survei Setara Institute (2023) mengungkapkan diskriminasi agama yang nyata dilakukan oleh siswa sekolah menengah. Pemaksaan penggunaan atribut identitas agama tertentu menjadi berita massal, dimana siswi kerap menjadi korban pemaksaan penyeragaman simbol agama di sekolah. Survei toleransi pelajar Indonesia yang dilakukan Setara Institute (2023) menunjukkan tren positif sebesar 70,2% memiliki sikap toleran, hal ini menunjukkan bahwa modal sosial toleransi pelajar masih kuat. Namun, lembaga pendidikan dapat menjadi tempat menebar kebencian antar suku dan agama sekaligus tempat menumbuhkan sikap dan perilaku toleran. Untuk mengatasi permasalahan ini, lembaga pendidikan harus meringkai pendidikan inklusif, mendekonstruksi pemikiran dalam perspektif agama yang logosentris dan simbolik, mengajarkan bahwa wajah agama yang sebenarnya adalah humanisme, dan memperkuat peran pendidik dalam mengembangkan budaya toleransi dan moderasi. Guru dan pejabat

sekolah mempunyai peran penting dalam menentukan arah karakter siswa, dan diperlukan peningkatan kapasitas yang berkelanjutan untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang toleran dan damai. Institusi pendidikan juga harus mendorong kekayaan pengalaman sosial dan interaksi sosial lintas agama. Penelitian menunjukkan bahwa indikator persahabatan yang beragam dan identitas budaya yang kuat merupakan faktor pelindung yang berkontribusi terhadap ketahanan siswa terhadap sikap dan perilaku intoleran. Penting bagi siswa untuk mengalami langsung perbedaan-perbedaan yang ada di lingkungannya, yang akan membantu proses penumbuhan siswa menjadi manusia dengan jati diri keberagaman yang kuat.

Kasus intoleransi di sekolah mencakup perundungan berbasis etnis, agama, dan status sosial. Fenomena ini menghambat perkembangan sosial dan emosional siswa serta menciptakan lingkungan belajar yang tidak sehat. Oleh karena itu, diperlukan strategi pembelajaran yang bukan hanya teoritis tetapi juga praktis dalam menanamkan nilai-nilai kewarganegaraan. Dalam konteks ini, implementasi pembelajaran kewarganegaraan di sekolah perlu diperkuat dan disesuaikan dengan kebutuhan zaman. Pendekatan yang berbasis pengalaman, diskusi interaktif, dan proyek sosial dapat menjadi alternatif yang efektif. Selain itu, kolaborasi antara guru, siswa, dan masyarakat sekitar dalam kegiatan kewarganegaraan praktis akan memperkaya pemahaman siswa tentang pentingnya toleransi dan keragaman (Sunhaji et al., 2023).

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana implementasi pembelajaran kewarganegaraan dapat menjadi upaya strategis dalam menanggulangi kasus toleransi dan diskriminasi di sekolah. Dengan memahami dinamika dan efektivitas metode pembelajaran yang digunakan, diharapkan dapat ditemukan model pembelajaran yang lebih inovatif dan berdampak positif terhadap sikap siswa dalam menghargai perbedaan.

## Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif yang bertujuan untuk mengeksplorasi permasalahan yang muncul dalam konteks sosial, dengan mengacu pada kerangka teori yang dikemukakan oleh Moleong (2014). Pendekatan metodologis yang diterapkan dalam penelitian ini difokuskan pada pemahaman mendalam terhadap pengalaman subjek penelitian, seperti perilaku, persepsi, motivasi bertindak, dan aspek lainnya, dengan penekanan pada deskripsi holistik menggunakan bahasa dan kata-kata.

Ciri-ciri penelitian ini bersifat deskriptif, dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai situasi, peristiwa, populasi, atau wilayah tertentu, sejalan dengan konsep Anggito dan Setiawan (2018) yang menekankan bahwa penelitian deskriptif bertujuan untuk menganalisis secara sistematis, faktual, dan akurat. menggambarkan faktanya. fakta dan hubungan antara fenomena yang diselidiki. Pada tahap analisis, seluruh data yang terkumpul dianalisis dan diorganisasikan untuk menyusun temuan penelitian yang nantinya akan dituangkan dalam bentuk tulisan ilmiah. Oleh karena itu, penelitian ini

menggunakan pendekatan deskriptif untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang topik yang diteliti.

## Hasil dan Pembahasan

### Pendidikan Kewarganegaraan

Pendidikan kewarganegaraan muncul sebagai pendekatan pendidikan kewarganegaraan yang alternatif, lebih dinamis, kritis, dan inklusif, yang dipromosikan oleh otoritas pendidikan nasional dan negara bagian. Pendidikan kewarganegaraan seringkali merupakan mata pelajaran yang bersifat *top-down* dan sangat normatif yang mendorong konformitas, kepatuhan, dan kepasifan melalui representasi masyarakat yang statis. Penting untuk dicatat bahwa program kewarganegaraan tradisional di Perancis atau Amerika sebagian besar berkaitan dengan status *quo* dan tidak mendorong siswa untuk melihat secara kritis masyarakat, meningkatkan kesadaran sosial, atau mendorong tindakan sosial demi masyarakat yang lebih adil (Starkey, 2022).

Pada akhir abad ke-20, pendidikan kewarganegaraan berkembang sebagai pendekatan alternatif, lebih dinamis, kritis, dan inklusif dibandingkan dengan pendidikan kewarganegaraan. Perkembangan ini bertepatan dengan periode demokratisasi negara-negara yang sebelumnya berada di bawah kendali militer, komunis, atau apartheid (1974-1994). Transisi dari konstitusi otoriter ke demokrasi di negara-negara di seluruh dunia memberikan kesempatan untuk mempertimbangkan kembali peran pendidikan dalam membangun masyarakat yang mampu menjalankan dan mempertahankan sistem demokrasi yang dinamis (Sakalli et al., 2021).

Pengenalan pendidikan wajib kewarganegaraan di Inggris pada pergantian abad ke-20 menarik perhatian internasional karena ukurannya sebagai salah satu sistem pendidikan kesatuan terbesar di dunia. Inisiatif ini didasarkan pada laporan tentang pendidikan kewarganegaraan dan demokrasi yang disiapkan oleh komite penasihat yang diketuai oleh filsuf politik Bernard Crick. Penerbitan Laporan Crick merangsang aliran artikel dan konferensi ilmiah, yang menyebabkan kementerian pendidikan di Inggris mendukung pelatihan guru kewarganegaraan dan pengenalan pendidikan kewarganegaraan ke semua sekolah pada tahun 2002 (Peter Brett et al., 2009). Namun, cara pendidikan kewarganegaraan dikonsepsi dan diterapkan di Inggris mendapat tantangan dari para ahli yang berargumen bahwa kurikulum tersebut terlalu terkait erat dengan pendidikan politik yang didasarkan pada institusi nasional dan kurang bersifat kosmopolitan. Pendidikan untuk kewarganegaraan kosmopolitan membingkai keberagaman sebagai sebuah keuntungan dalam masyarakat demokratis dan memastikan bahwa siswa dari kelompok minoritas adalah sebuah aset dan bukan sebuah beban (Rakhi Pande, 2022).

### Toleransi dan Diskriminasi

Diskriminasi terhadap budaya, ras, suku, dan agama dihapuskan, dan manusia tetap sama tanpa ada perbedaan. Para pendidik dan masyarakat Indonesia mempunyai pegangan terhadap nilai-nilai toleransi yang diatur oleh negara, yang mengurangi konflik akibat perbedaan ras, suku, budaya, dan agama. Kerja sama dengan berbagai komponen

masyarakat diperlukan untuk mewujudkan pendidikan yang humanis dan ramah terhadap perbedaan, sesuai amanat sistem pendidikan nasional (D. Mulyana, 2022).

Menanamkan nilai-nilai toleransi pada pelajar di Indonesia sangatlah penting, karena negara ini memiliki lingkungan yang tidak hanya memiliki satu pemahaman agama, suku, dan budaya. Salah satu bidang yang masih perlu dibenahi adalah toleransi beragama. Masyarakat Indonesia harus meningkatkan intelektualitas dan pemahaman toleransi serta tidak termakan isu-isu yang memecah-belah toleransi dalam beragama (Sunhaji et al., 2023). Umat beragama mayoritas dan minoritas harus saling mendukung dan melindungi dalam urusan sosial, sehingga setiap orang bisa menjalankan keyakinannya. Sekolah harus mengajarkan nilai-nilai toleransi selain dari orang tua di rumah, sehingga nilai-nilai toleransi dapat tertanam dalam diri anak.

Pendidikan merupakan suatu proses yang panjang dan harus ada intervensi dari berbagai pihak dan pembiasaan pada diri anak agar internalisasi nilai dapat tercapai. Sekolah merupakan lingkungan tempat siswa membina dirinya menjadi individu yang cerdas dan berkarakter baik. Indonesia memiliki budaya suku yang beragam dan penganut berbagai agama, memiliki banyak sekolah yang menampung siswa dari berbagai suku, budaya, dan agama. Sekolah menerapkan kebiasaan-kebiasaan yang mendukung internalisasi nilai-nilai toleransi pada siswanya, seperti mengadakan acara keagamaan, kebiasaan literasi sebelum kegiatan pembelajaran, dan kegiatan keagamaan yang melibatkan seluruh siswa dan keyakinannya masing-masing (D. Mulyana, 2022).

### **Kondisi Toleransi dan Diskriminasi di Sekolah-Sekolah Indonesia**

Salah satu kasus dimana pihak berwenang Indonesia mendakwa enam karyawan jaringan hiburan malam Holywings atas penodaan agama setelah promosi *online* yang menawarkan minuman beralkohol gratis untuk pria bernama Muhammad dan wanita bernama Maria. Promosi penggunaan nama Nabi Muhammad memicu kemarahan di negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia. Keenam anggota staf tersebut sekarang menunggu persidangan atas tuduhan penodaan agama dan pelanggaran hukum internet di Indonesia, dan jika terbukti bersalah, mereka menghadapi hukuman hingga 15 tahun penjara. Indonesia mempromosikan dirinya sebagai benteng toleransi di dunia Muslim, namun kelompok agama minoritas tetap waspada untuk menghindari konflik. Konstitusi Indonesia melindungi kebebasan beragama, namun penganut agama minoritas dan ateis semakin banyak mengalami diskriminasi. Dengan 87 persen penduduknya beragama Islam, hanya Islam yang dianggap sebagai cabang Islam terbesar secara global (Raihani, 2014).

Meningkatnya intoleransi beragama di Indonesia semakin mengkhawatirkan, karena Kristen merupakan agama minoritas terbesar. Peraturan Kerukunan Beragama mewajibkan rumah ibadah untuk memiliki izin, penandatanganan, dukungan, dan persetujuan oleh setidaknya 150 penduduk dan pejabat setempat, yang menyebabkan lebih dari 2.000 gereja ditutup sejak peraturan tersebut diberlakukan. Umat Kristen juga pernah mengalami kekerasan, seperti penyerangan terhadap desa mayoritas Kristen di Sulawesi pada tahun 2020 oleh Mujahidin Indonesia Timur, yang berafiliasi dengan ISIS (S. Khairani et al, 2023).

Sekte minoritas Islam juga menghadapi diskriminasi dan ancaman. Pada tahun 2008, pemerintah Indonesia menandatangani keputusan yang melarang Ahmadiyah, sebuah sekte Islam minoritas, menyebarkan ajarannya berdasarkan UU Penodaan Agama. Pelanggar menghadapi hukuman lima tahun penjara. Penganiayaan terhadap Ahmadiyah terus berlanjut, dengan 24 pengikut Ahmadiyah diusir dari desa mereka di Lombok Timur pada tahun 2018 dan sebuah masjid Ahmadiyah diserang dan dibakar oleh sekitar 200 orang dari Aliansi Muslim di Sintang, Kalimantan Barat pada bulan September. Taruhannya sangat besar sehingga Amerika Serikat, Australia, Jepang, Eropa, dan negara-negara Amerika Latin telah memperingatkan Indonesia mengenai meningkatnya intoleransi beragama. Departemen Luar Negeri AS telah menyumbangkan lebih dari \$40 juta untuk membantu Indonesia dalam mempromosikan toleransi beragama. Namun, tidak ada akhir yang terlihat: "Hapus semua undang-undang yang diskriminatif ini," kata Harsono. Meski terdapat laporan diskriminasi, Saifuddin berpendapat bahwa undang-undang tersebut tidak boleh dihapuskan, karena ia mengklaim bahwa undang-undang tersebut adalah bukti tanggung jawab negara untuk melindungi kelompok minoritas (Laura Arman, 2022).

Pada tahun 2018, permohonan penghapusan UU Penodaan Agama ditolak oleh Mahkamah Konstitusi Indonesia. Harsono mendesak masyarakat Indonesia untuk membedakan antara kelompok Islamis politik dan Muslim dan jangan pernah meremehkan pengaruh dan peringatan yang dapat membantu mengakhiri intoleransi beragama (Laura Arman, 2022).

### **Tantangan dalam Implementasi Pembelajaran Kewarganegaraan**

Pendidikan kewarganegaraan (CSPE) telah dikritik karena sifatnya yang takut-takut dalam kaitannya dengan komponen politiknya, dan Garret FitzGerald menggambarkan silabus tersebut sebagai 'sangat lemah dalam kaitannya dengan komponen politiknya'. Dewan Kurikulum dan Ujian (CEB) menyusun silabus pada tahun 1987, yang mengusulkan penyusunan pembelajaran siswa berdasarkan konsep-konsep utama, yang merupakan ciri khas silabus saat ini. Tidak adanya referensi eksplisit terhadap 'kekuasaan' sebagai konsep utama dapat dilihat sebagai kelemahan program CSPE saat ini. Penggabungan Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia ke dalam hukum Irlandia menimbulkan pertanyaan penting bagi CSPE. Fleksibilitas silabus merupakan kekuatan utama, menawarkan potensi untuk tanggap, pertumbuhan, dan pengembangan, namun sifat konseptualnya yang luas mungkin dianggap kabur dan umum, sehingga menyebabkan para praktisi mengambil pandangan minimalis terhadap tuntutannya (Cho, 2017).

Pendidikan yang efektif untuk kewarganegaraan dan keberagaman mengharuskan guru untuk mengembangkan tidak hanya potensi proyek aksi tetapi juga keseluruhan silabus. Silabus yang ada saat ini dapat dilihat sebagai fondasi untuk mata pelajaran senior 'Politik dan Masyarakat', dan hampir mustahil bagi CSPE untuk bertahan dalam Sistem Sertifikat Kepergian tradisional tanpa dimensi akademis inti (Cho, 2017). Mata pelajaran kewarganegaraan sangat penting untuk pembelajaran yang dipersonalisasi, namun seringkali dianggap kurang bermakna karena banyaknya modul di dalamnya. Subjek-

subjek ini memiliki dua nilai kepribadian utama: langsung dan primer. Nilai langsung bertujuan untuk menghasilkan peserta didik yang religius, jujur, cerdas, tangguh, demokratis, dan disini, sedangkan nilai primer bertujuan untuk menghasilkan peserta didik yang nasionalis, berpegang teguh pada ketentuan sosial, menghargai keberagaman, dan bertanggung jawab. 18 nilai kepribadian bangsa yang harus ditanamkan dalam pembelajaran antara lain religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, komunikatif, cinta damai, kecintaan membaca, area tinggi, sosial di sini, dan tanggung jawab.

Metode penilaian dalam pembelajaran pendidikan kewarganegaraan tidak bervariasi, guru mengevaluasi perilaku siswa melalui berbagai metode. Hambatannya mencakup aktivitas pengajaran yang serba cepat dan kurangnya pembelajaran yang dipersonalisasi dalam keluarga. Untuk mengatasi hal tersebut, pihak sekolah memberikan kesempatan kepada anak untuk memperoleh pembelajaran kepribadian di rumah pada hari Sabtu dan Minggu serta mengajak orang tua untuk bertukar pengetahuan tentang pembelajaran kepribadian. (Pertwi et al., 2022).

Sebuah penelitian mengungkapkan bahwa guru di Botswana kurang mendapatkan pelatihan yang memadai untuk mengajarkan topik Pendidikan Budaya (C.E.), dengan hanya 30,7% yang belajar melalui persiapan guru dan 23,07% tidak mendapatkan paparan. Tantangannya meliputi kekurangan sumber daya, kebingungan mengenai hak dan tanggung jawab, dan lambatnya pembelajaran. Mayoritas guru menyukai teknik diskusi, yang memungkinkan siswa meneliti beragam masalah dan membuat penilaian rasional. Namun, integrasi konten masih kurang, sehingga sulit untuk mencapai rangkaian tematik. Selain itu, banyak responden menyukai teknik ceramah karena silabusnya yang rumit. Temuan-temuan ini menimbulkan kekhawatiran mengenai tujuan dispensasi demokratis di negara ini dan efektivitas metode pengajaran C.E (Peter Brett et al., 2009).

Pendidikan kewarganegaraan didasarkan pada teori kosmopolitanisme dan hak asasi manusia, yang dapat dikonseptualisasikan dalam istilah kosmopolitanisme. Pembelajaran bahasa, bahkan untuk tujuan bisnis, merupakan bagian dari pendidikan humanistik yang mendorong komunikasi antar budaya berdasarkan kesetaraan. Namun, tanpa kerangka acuan hak asasi manusia yang eksplisit, perbandingan antar budaya dapat menimbulkan stereotip, komentar rasis atau seksis, dan komentar yang menghina. Hal ini bertentangan dengan semangat hak asasi manusia, yaitu menghormati orang lain (Peter Brett et al., 2009).

Pengetahuan dan pemahaman tentang hak asasi manusia membekali guru dan peserta didik untuk berinteraksi dengan budaya lain atas dasar kesetaraan martabat. Pedagogi yang terkait dengan pembelajaran bahasa memberikan banyak peluang untuk mengembangkan keterampilan kewarganegaraan dan membiasakan pelajar dengan konsep-konsep utama yang terkait dengan demokrasi. Di kelas bahasa komunikatif, pembelajar sering kali dituntut untuk berbicara dan berdiskusi secara berpasangan dan kelompok, memiliki kebebasan untuk mengemukakan pendapat dan mengembangkan ide serta cara berpikir baru (Sakalli et al., 2021). Mengadopsi pendekatan hak asasi manusia dalam pengajaran bahasa memberikan kerangka kerja yang baik untuk mengkaji isu-isu kontroversial.

Perdebatan dilakukan untuk menunjukkan rasa hormat terhadap seseorang, terutama lawan bicaranya, sebagai penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia. Pernyataan yang meremehkan individu atau kelompok yang tidak hadir juga merupakan perilaku yang tidak pantas dan oleh karena itu tidak dapat diterima (Sianipar et al., 2021).

Guru yang mengambil posisi hak asasi manusia memperkenalkan aturan-aturan dasar untuk memastikan bahwa ekspresi pendapat dan konflik pandangan bersifat produktif dan tidak destruktif. Dengan menciptakan kesenjangan komunikasi dan mendorong siswa untuk mengeksplorasi perbedaan pendapat, mereka dapat mendorong kontroversi di kelas, mengembangkan kefasihan linguistik mereka karena mereka fokus pada isi perdebatan daripada bentuk bahasa yang mereka gunakan (Oats & Oats, 2023).

### **Metode Pembelajaran dalam Menanamkan Nilai-Nilai Toleransi dan Anti-Diskriminasi kepada Siswa**

Guru berperan penting dalam menjaga kepribadian dan perilakunya, menjadi teladan dan sahabat bagi siswa. Mereka harus menanamkan nilai-nilai seperti toleransi dalam beragama, seperti saling menghormati, kerja sama, dan kesetaraan. Guru dapat memberikan nasehat kepada siswa untuk menginternalisasikan nilai-nilai tersebut, baik secara individu maupun kelompok. Cara ini penting untuk menjaga keharmonisan masyarakat yang memiliki pluralisme agama.

Studi menunjukkan pada Yayasan Immaculata, para guru memberikan nasehat kepada siswa di berbagai acara keagamaan, seperti acara buka puasa dan halal bi halal. Proses pembiasaan ini membantu siswa menginternalisasikan nilai-nilai toleransi beragama dalam pendidikan Islam. Sekolah-sekolah di Cilacap secara rutin mengadakan kegiatan keagamaan, seperti kegiatan buka puasa, Syawalan, dan lomba Islami, untuk membantu siswa menerima perbedaan dan tidak membedakan. Sebaliknya, pelajar yang beragama Katolik atau Kristen diharapkan untuk menghormati teman-temannya yang beragama Katolik pada hari-hari besar keagamaan, seperti Natal dan Bulan Kitab Suci Nasional. Sekolah memfasilitasi ruang dan fasilitas bagi siswa untuk berkomunikasi, berkolaborasi, dan belajar menghargai serta menghargai teman yang berbeda agama melalui keterlibatan bersama dalam setiap kegiatan. Guru berperan penting dalam menanamkan nilai-nilai toleransi pada siswa, meningkatkan kerja sama dan menghargai partisipasi siswa lintas agama (Sunhaji et al., 2023).

Pendidikan agama Kristen (CRE) berperan penting dalam membentuk sikap anti-diskriminatif siswa. Untuk mencapai hal ini, guru CRE harus mengembangkan model pembelajaran yang relevan dan berorientasi pada Alkitab yang mendorong penerimaan dan penghargaan. Alkitab menceritakan kisah-kisah tentang mengasihi sesama, menghormati dan menghormati orang-orang yang berbeda, dan menyambut kelompok-kelompok yang berbeda secara sosial. Guru CRE dapat membuat model pembelajaran yang mendorong keterlibatan siswa dan mendorong diskusi terbuka. Namun, mereka juga harus mengakomodasi beragam kebutuhan dan minat siswa, termasuk mereka yang berkebutuhan khusus. Untuk menerapkan model pembelajaran CRE anti-diskriminatif,

guru harus menerapkan pendekatan multikultural, antar budaya, dan inklusif, memastikan bahwa siswa dapat berkomunikasi dan memahami sudut pandang satu sama lain.

### **Peran Guru dan Lingkungan Sekolah dalam Mendukung Pembelajaran Kewarganegaraan yang Efektif**

Seorang guru memegang peranan penting dalam proses pembelajaran dengan memberikan fasilitas dan kenyamanan, menciptakan lingkungan yang sesuai dengan perkembangan anak, dan memperlakukan siswa sebagai mitra dalam mengeksplorasi dan mengolah informasi. Sebagai fasilitator, guru harus mengambil keputusan berdasarkan aspek-aspek yang relevan, seperti materi yang sesuai, metode presentasi, alat, dan sistem evaluasi. Mereka juga harus menemukan sumber belajar yang berguna, seperti buku, teks, dan surat kabar, untuk mendukung pencapaian tujuan dan proses belajar mengajar. Siswa dapat terlibat dalam berbagai jenis aktivitas, seperti aktivitas visual, lisan, mendengarkan, menulis, menggambar, motorik, mental, dan emosional. Peran guru adalah membuat pilihan yang mendukung tujuan dan sasaran proses pembelajaran, menjamin keberhasilan pengalaman belajar bagi semua siswa (Cho, 2017).

Peran guru dalam memberdayakan masyarakat masa depan dan dampaknya terhadap komunitas global. Hal ini menyoroti pentingnya menggabungkan pendidikan berbasis nilai di sekolah untuk mendorong hidup berdampingan secara berkelanjutan dan kewarganegaraan yang bertanggung jawab. Kurikulum harus mendukung guru dalam memberdayakan peserta didik dan menciptakan warga global. Dengan memasukkan 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) ke dalam kurikulum, guru dapat memberikan pendidikan yang bermakna dan relevan dengan cara yang berbeda, mengikuti tuntutan dunia yang berubah dengan cepat (D. Mulyana, 2022).

Pedagogi harus fokus pada pemberdayaan, mendorong iklim kelas terbuka, pembelajaran berbasis proyek, dan pemikiran kritis di kalangan siswa. Pengajaran yang berbeda sangat penting dalam menumbuhkan konstruksi baru di kalangan peserta didik. Guru harus mengizinkan bentuk penilaian yang kreatif, mendorong perdebatan, dan mengakui gagasan tersebut. Misalnya, seorang siswa yang menyerahkan tugas Shakespeare yang tidak terduga membuat aplikasi dan menganimasikan pertarungan antara Macbeth dan Macduff, menunjukkan kreativitas melebihi apa yang diharapkan gurunya (Rakhi Pande, 2022).

Menumbuhkan pemberdayaan pada siswa mengarah pada pemahaman hak asasi manusia dan demokrasi, yang penting untuk mengembangkan kewarganegaraan masa depan baik secara digital maupun global. Guru memainkan peran penting dalam menginspirasi anak-anak untuk menjadi manusiawi, sukses, dan menciptakan dorongan untuk menjadi sesuatu. Ketika pemahaman tentang apa yang mereka inginkan tidak hanya ditentukan oleh uang dan ketenaran tetapi juga oleh kesadaran lingkungan dan sosial, mereka telah memainkan peran yang sukses dalam memberdayakan masyarakat global di masa depan (Peter Brett et al., 2009).

Pemberian pelatihan dan pengembangan berkelanjutan kepada guru Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) sangat penting untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan

pengajaran di bidang kewarganegaraan. Hal ini mencakup pemahaman kurikulum terkini, update isu-isu terkini terkait kewarganegaraan, dan penggunaan teknologi terkini untuk mendukung pembelajaran interaktif. Guru juga dapat fokus mengembangkan keterampilan pedagoginya, termasuk metode pengajaran inovatif yang memotivasi dan melibatkan siswa secara aktif dalam proses pembelajaran. Pembangunan berkelanjutan juga dapat menekankan nilai-nilai karakter dalam setiap aspek pembelajaran, seperti kerjasama, kepemimpinan, dan tanggung jawab sosial (Pertiwi et al., 2022).

Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam proses pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) dapat membuka peluang besar untuk perbaikan. Platform digital menyediakan akses terhadap materi pembelajaran yang interaktif dan mudah diakses, sedangkan multimedia seperti video pembelajaran dapat menggambarkan konsep kewarganegaraan secara menarik dan mendalam. Sumber daya *online* juga dapat diintegrasikan ke dalam pembelajaran kewarganegaraan untuk memberikan tambahan wawasan dan mendukung penelitian siswa (Sakalli et al., 2021). Pemantauan dan evaluasi rutin terhadap pelaksanaan program pendidikan kewarganegaraan sangat penting untuk memastikan keberhasilan dan efektivitas strategi. Proses ini harus melibatkan berbagai pemangku kepentingan, antara lain guru, siswa, orang tua, serta pihak terkait di tingkat sekolah dan pemerintah daerah. Evaluasi rutin harus bersifat holistik dan obyektif, menilai efektivitas program pendidikan kewarganegaraan secara keseluruhan (Cho, 2017).

Mendorong partisipasi aktif dalam kegiatan ekstrakurikuler merupakan strategi yang efektif dalam mengembangkan keterampilan kewarganegaraan dan memperkuat jati diri bangsa. Kegiatan seperti debat, forum diskusi, dan proyek sosial dapat membantu siswa mengembangkan keterampilan analitis, kepemimpinan, kerja tim, dan empati. Dengan mendukung dan mendorong partisipasi siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler tersebut, sekolah dapat menciptakan lingkungan belajar yang dinamis dimana siswa tidak hanya memperoleh pengetahuan teoritis tetapi juga menerapkan nilai-nilai kewarganegaraan dalam tindakan nyata, sehingga membentuk generasi yang peduli dan aktif membangun masyarakat (D. Mulyana, 2022).

## Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan di atas maka dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa internalisasi nilai-nilai toleransi, seperti sikap hormat, gotong royong, kerja sama, keadilan, kesetaraan, kebebasan, dan tanggung jawab, mencegah diskriminasi, konflik, perundungan, dan saling curiga dalam pendidikan. Sekolah melibatkan seluruh siswa dalam berbagai kegiatan, termasuk kegiatan keagamaan, dan menugaskan komite teknis untuk memastikan inklusivitas dan kerja sama. Penilaian terhadap pelaksanaan pembelajaran kewarganegaraan sebagai pembelajaran kepribadian, guru telah melakukan berbagai evaluasi namun belum maksimal dalam menilai perilaku siswa sepanjang proses pendidikan. Upaya pedagogi melalui pembelajaran kewarganegaraan sebagai pembelajaran kepribadian (CRE) merupakan upaya bersama untuk membentuk sikap anti

diskriminatif pada siswa. Guru harus mendukung dan melakukan pengembangan profesional untuk mengatasi tantangan diskriminasi saat ini.

Guru kini memerlukan kompetensi kolektif dan kompetensi yang terus berkembang untuk mendidik generasi muda memahami dunia mereka dan menjadi warga negara yang aktif. Pengembangan empat bidang kompetensi inti praktik di kelas termasuk pendekatan lintas kurikuler, pengembangan kemitraan dan evaluasi bertujuan untuk membantu guru, sekolah dan masyarakat. Sikap pemerintah terhadap pendidikan kewarganegaraan masih ambigu, dengan silabus PKn yang lama dipandang membosankan dan konformis, sedangkan silabus Pendidikan Kewarganegaraan, Sosial dan Politik (CSPE) menekankan konsep-konsep kunci, partisipasi aktif, dan eksplorasi komprehensif pendidikan kewarganegaraan, sosial, dan politik. dimensi politik. Sertifikat Kelulusan Terapan mencakup modul Pendidikan Sosial, dan program Tahun Transisi memungkinkan sekolah mengeksplorasi berbagai bidang pendidikan untuk kewarganegaraan dan keberagaman. Meskipun pendidikan kewarganegaraan sudah lebih mapan dalam program pendidikan guru awal, terdapat keraguan mengenai efektivitasnya.

### Daftar Pustaka

- Cho, H. S. (2017). Issues and challenges of educators in implementing global citizenship education in South Korea. *KEDI Journal of Educational Policy*, 14(2).
- D. Mulyana. (2022). STRATEGIC PLANNING FOR EFFECTIVE MANAGEMENT OF CITIZENSHIP EDUCATION IN SCHOOLS. *JURNAL INFOKUM*, 10(5).
- Laura Arman. (2022, October 10). *In Indonesia, a Rising Tide of Religious Intolerance*. The Diplomat. <https://thediplomat.com/2022/10/in-indonesia-a-rising-tide-of-religious-intolerance/>
- Oats, R., & Oats, L. K. (2023). Enhancement of Sustainable Education for All: A Reality or Illusion in Botswana. *International Journal of Education and Teaching*, 2(2). <https://doi.org/10.51483/ijedt.2.2.2022.41-49>
- Pertiwi, P. S., Lion, E., & Sakman, S. (2022). PENGUASAAN KOMPETENSI PEDAGOGIK GURU PPKn ANTARA YANG BERSERTIFIKASI PENDIDIK DAN BELUM BERSERTIFIKASI PENDIDIK DI SMK NEGERI 2 PALANGKA RAYA. *Jurnal Paris Langkis*, 3(1). <https://doi.org/10.37304/paris.v3i1.4617>
- Peter Brett, Pascale Mompoin-Gaillard, & Maria Helena Salema. (2009). *How all teachers can support citizenship and human rights education*. Council of Europe Publishing.
- Putri, H. (2024). Reorientation of Pancasila and citizenship education in elementary schools in the discourse of smart and good citizenship. *International Journal of Students Education*, 226–230. <http://doi.org/10.62966/ijose.vi.769>
- Raihani. (2014). Creating a culture of religious tolerance in an Indonesian school. *South East Asia Research*, 22(4). <https://doi.org/10.5367/sear.2014.0234>
- Rakhi Pande. (2022, April 24). *Role of Teachers in Empowering Future Citizens*.

- 
- Sakallı, Ö., Tlili, A., Altınay, F., Karaatmaca, C., Altınay, Z., & Dağlı, G. (2021). The Role of Tolerance Education in Diversity Management: A Cultural Historical Activity Theory Perspective. *SAGE Open*, 11(4). <https://doi.org/10.1177/21582440211060831>
- Sianipar, D., Sairwona, W., Hasugian, J. W., Ritonga, N., & Zega, Y. K. (2021). Teaching anti-discrimination attitudes through christian religious education in school. *International Journal for Educational and Vocational Studies*, 3(4). <https://doi.org/10.29103/ijevs.v3i4.4101>
- Starkey, H. (2022). Challenges to global citizenship education: Nationalism and cosmopolitanism. In *Global Citizenship in Foreign Language Education: Concepts, Practices, Connections*. <https://doi.org/10.4324/9781003183839-5>
- Sunhaji, Atabik, Eka Pradana, A., & Dharin, A. (2023). Strategies for Internalizing The Values of Tolerance in Schools In Cilacap Central Java Indonesia. *Pegem Journal of Education and Instruction*, 14(1). <https://doi.org/10.47750/pegegog.14.01.09>
- Syafira Khairani, & Suwarno Joyomenggolo. (2023, July 17). *Intolerance and the Importance of Inclusive Education in the Post-Truth Era*. International NGO Forum NGO Indonesia Development.
- Tolerance Education in the Hidden Curriculum: A Case Study on Indonesian Public School. (2018). *Masyarakat Jurnal Sosiologi*, 23(1). <https://doi.org/10.7454/mjs.v23i1.7841>